

## Kota Serang Masih 'Dihantui' Miras, 4.627 Botol Dimusnahkan

**SERANG (IM)**- Peredaran minuman keras (miras) masih menghantui wilayah di Kota Serang. Sebanyak 4.627 botol dimusnahkan.

Wali Kota Serang, Syafudin mengatakan, ribuan miras yang dimusnahkan hasil dari operasi petugas selama periode tahun 2022. Menurutnya, seharusnya tidak boleh ada lagi peredaran miras di Kota Serang. Mengingat, yang diperbolehkan ada penjualan miras hanya di hotel bintang di atas empat. "Ini menjadi program pemkot serang terutama Kota-PP, karena miras di Kota Serang ini sebenarnya harus tidak ada, kecuali hotel berbintang, di atas bintang empat, jadi tidak boleh dijual secara ilegal," katanya, Senin (16/1). Ia mengaku telah men-

ginstruksikan Satpol PP agar melakukan operasi agar Kota Serang dapat terbebas dari miras. "Kami berharap kepada Satpol PP untuk terus melakukan operasi dalam rangka membebaskan Kota Serang dari miras yang beredar secara ilegal," terangnya.

Sementara itu, Kepala Satpol-PP Kota Serang, Heri Hadi menambahkan, temuan barang bukti tersebut merupakan hasil dari operasi secara senyap atau dilakukan secara diam-diam oleh petugas. "Ini merupakan titik dari informasi yang diperoleh masyarakat, jadi operasi kita ini merupakan operasi senyap, operasi intelijen, nggak terbuka, jadi di tempat-tempat yang diduga ada miras yang dijual secara ilegal," tambahnya. ● pra



IDN/ANTARA

### RITUAL MEMANDIKAN RUPANG DI VIHARA DHANAGUN BOGOR

Sejumlah warga keturunan Tionghoa mengikuti ritual memandikan dan membersihkan rupang (patung dewa dan dewi) di Vihara Dhanagun, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (16/1). Ritual memandikan dan membersihkan puluhan patung dewa dan dewi tersebut dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 2754 pada 22 Januari 2023.

## Mahasiswa Utara Protes Dana KIP Kuliah Dipotong Sepihak

Menurut Zei, mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Utara, dana KIP Kuliah tidak semestinya ada pemotongan, apalagi dengan dalih untuk mencakupi peserta yang tidak lolos verifikasi program tersebut. Pihak kampus diminta untuk terbuka soal anggaran program KIP Kuliah yang selama ini masih dipertanyakan.

### TANGERANG (IM)

Mahasiswa Universitas Tangerang Raya (Untara) memprotes adanya pemotongan dana penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang dilakukan pihak kampus secara sepihak.

Dari program KIP Kuliah tersebut, sebanyak kurang lebih 60 mahasiswa yang mendapatkan bantuan untuk biaya hidup, dipotong sebesar Rp1,5 juta oleh pihak kampus tanpa alasan jelas. Jadi para mahasiswa hanya menerima Rp5,7 juta.

Seperti yang diungkapkan Zei, mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora

Untara. Dirinya juga menuntut penjelasan kampus terkait potongan dana tersebut. Pada 22 November 2022 lalu, dirinya sudah menemui pihak akademik dan keuangan untuk meminta serta menuntut penjelasan.

Alasan kampus pihak kampus memotong anggaran KIP Kuliah untuk memenuhi cakupan peserta yang tidak lolos di program tersebut. Menurutnya, dana KIP Kuliah tidak semestinya ada pemotongan, apalagi dengan dalih untuk mencakupi peserta yang tidak lolos verifikasi program tersebut. Ia menilai jawaban yang disampaikan

oleh kampus tidak masuk akal.

"Yang jelas, tidak ada konfirmasi mengenai pemotongan uang KIP Kuliah dari pihak kampus," kata Zei, Senin (16/1).

Zei meminta kepada pihak kampus untuk terbuka soal anggaran program KIP Kuliah yang selama ini masih dipertanyakan. "Yang saya mau tanyakan apakah memang KIP boleh dipotong biaya admin sebesar Rp1,5 juta di Indonesia? Atau itu tidak berlaku di tempat lain, kecuali di Untara?" ujarnya.

Ia juga mengutarakan bahwa kampus Untara selalu memberikan alasan yang dinilainya tidak konkrit. Karena itu, permasalahan ini dia ungkapkan di media agar masyarakat bisa menilainya.

"Hal ini sudah saya sampaikan ke pihak kampus namun tidak di respon, jadi saya bingung harus menyampaikan ke mana lagi? biarkan lah media, netizen dan publik yang menilainya," ketus Zei.

Selain itu, pihak Kampus Untara pun memblokir akses E-Campus beberapa

mahasiswa Untara yang belum membayar administrasi. Sedangkan, administrasi tersebut dibiayai oleh KIP Kuliah.

Biaya admin tersebut bisa dicitil selama 3 semester. Namun sampai saat ini, ia belum membayar karena menolak kebijakan kampus itu. "Sekarang E-Campus saya sudah di non-aktifkan (diblokir), sehingga tidak bisa absen dan mengakses pelajaran. Yang lainnya hampir sudah membayar semua, karena takut diblokir. Ada yang mau menuntut tapi takut kalau nanti justru KIP-nya malah dicabut," bebarnya.

Sementara itu Humas Untara, Aries Sundoro mengatakan penerima KIP Kuliah ada dua kategori, yaitu jalur aspirasi dan jalur pemerintah. Untuk jalur aspirasi memang ada beberapa peserta tersebut yang gagal. Maka dari itu, pihak kampus mengambil kebijakan untuk memfasilitasi para penerima jalur aspirasi.

Pemotongan itu diperuntukkan untuk almamater dan diperbolehkan berdasarkan ketentuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Setahu saya,

memang ada Rp1.250.000 untuk almet. Jadi di dalam ketentuan Dikdik memang diperbolehkan, yang penting tidak memotong uang saku dan uang SPP. Karena uang saku itu langsung ditransfer ke mahasiswa masing-masing," ungkapnya.

Dia juga menjelaskan, awalnya para mahasiswa digratiskan biaya kuliah selama dua semester. Namun, sejauh ini program bantuan KIP kuliah jalur aspirasi tersebut belum diterima. "Kalau yang saya tahu dua semester itu tidak dibayar, gratis. Tapi belum ada uang masuk dari program aspirasi dewan itu," ujarnya.

Dirinya juga mengatakan terkait persoalan akses E-Campus mahasiswa yang diblokir. Lantaran sebelumnya dalam kurun satu tahun atau dua semester biaya kuliah digratiskan, sehingga pihak kampus membuat kebijakan pembayaran administrasi.

"Satu tahun tidak membayar kuliah, bagaimana ini permasalahan? Sehingga muncullah kebijakan ini (pemotongan Rp1,5 juta)," pungkasnya. ● pp

## Pertanian Pangan Jadi Andalan Ekonomi Masyarakat Lebak

**LEBAK (IM)**- Sektor pertanian pangan khususnya padi sawah di Kabupaten Lebak, Banten, hingga kini menjadi andalan ekonomi masyarakat dan mampu mensejahterakan kehidupan mereka. "Kita meyakini pertanian beras dapat mendorong ekonomi masyarakat," kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Rahmat di Lebak, kemarin.

Pemerintah daerah mengapresiasi pencapaian produksi beras 2022 sebanyak 300.194 ton. Keberhasilan itu melibatkan koordinasi semua pihak, termasuk kelompok tani. Pencapaian target pangan itu dapat memenuhi ketersediaan beras di Kabupaten Lebak.

Selama ini, sektor usaha pertanian pangan memberikan multitefek besar untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Mulai petani, pemetik, buruh panggul, tengkulak, pengemudi hingga pedagang pengecer. Masyarakat Kabupaten Lebak yang mengembangkan sektor pertanian pangan didukung lahan begitu luas. Bahkan, wilayah Kabupaten Lebak masuk daerah lumbung pangan di Banten dengan tanam seluas 110 ribu hektare dengan tiga kali musim panen padi selama setahun. "Kami melihat usaha sektor pertanian pangan yang besar menyumbangkan pendapatan ekonomi masyarakat," kata Rahmat.

Menurut dia, pertanian pangan padi sawah di Kabupaten Lebak pada 2022 menghasilkan gabah kering sebanyak 545.807 ton. Jika dikonversikan menjadi beras mencapai 300.194 ton setara beras. Dengan produksi beras sebanyak itu dikalikan harga rata-rata Rp 9.500 per kilogram maka perputaran uang bisa mencapai triliun rupiah.

"Kami meyakini perputaran uang sebesar itu dapat mendorong ekonomi masyarakat," kata Rahmat.

Ia mengatakan, pemerintah daerah mendorong agar petani

yang sudah memasuki panen padi segera melaksanakan gerakan tanam serentak. Gerakan tanam serentak sangat menguntungkan petani, karena dapat mencegah berbagai penyakit hama tanaman juga masa panen berbarengan, sehingga produksi pangan melimpah.

Selain itu juga petani dapat mengembangkan budidaya tanaman hortikultura jenis aneka sayuran dan buah-buahan jika panen bisa mengulirkan perputaran ratusan miliar rupiah per tahun. Bahkan saat musimnya, buah-buahan seperti durian, mangga, rambutan, koranji, dukuh, termasuk pisang dipasok ke luar daerah hingga ekspor ke Timur Tengah.

Produksi tanaman palawija seperti jagung kacang, tanah, dan umbi-umbian pada 2022 sebanyak 37.121 ton. Ditambah usaha perkebunan, seperti kelapa, melinjo, aren, sawit, kakao, kopi dan karet, uang yang bergulir di masyarakat bisa mencapai ratusan miliar rupiah per tahun. "Kami setiap tahun mendorong petani dapat meningkatkan areal penanaman sehingga produksi dan produktivitas menguntungkan usaha masyarakat itu," kata dia.

Rahmat melanjutkan, sebagian besar warga Kabupaten Lebak dengan penduduk 1,3 juta hasil pendataan 2021 berprofesi usaha pertanian dan perkebunan, karena didukung lahan yang luas. Pemerintah daerah terus meningkatkan usaha sektor pertanian dan perkebunan menjadi andalan ekonomi masyarakat dan diharapkan bisa mensejahterakan.

Saat ini, program pertanian menjadi skala prioritas pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi krisis global. "Kami bersama pemangku kepentingan termasuk petani terus menggenjot produksi pangan dengan penerapan teknologi budi daya pertanian. Mulai penggunaan benih unggul, penanaman, hingga penanganan pascapanen," kata Rahmat menjelaskan. ● pra

## Petugas KPU Tangerang Harus Menjaga Integritas

**TANGERANG (IM)**- Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tanggung jawab yang besar sebagai penyelenggara pemilu. Pasalnya, pertaruhan masa depan bangsa dimulai dari penyelenggaraannya.

Baik dan buruknya, bahkan korup tidaknya pemimpin bangsa terletak di proses serta sistem penyelenggara pemilu yang akan dilaksanakan.

Sehubungan dengan itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang, Ahmad Syailendra mengatakan bahwa menjadi bagian dari penyelenggara pemilu harus memiliki integritas yang kuat.

Karena itu, kata Syailendra, setiap petugas harus menjaga integritasnya. Caranya, lanjut dia, tentu saja dengan mengikuti aturan dan regulasi yang sudah ditetapkan.

Terlebih lagi, lembaga penyelenggara pemilu tidak lepas dari stigma buruk masyarakat, yang dianggap curang dalam prosesnya. Dalam menyikapi stigma itu, menurut Syailendra, para petugas harus bekerja ses-

uai on the track. "Jika diminta mengamankan, kami mengamankan seluruh peserta pemilu tanpa terkecuali - mengedepankan azas pemilu luber dan jujur," kata Syailendra.

Selama menjabat Ketua KPU Kota Tangerang, kata Syailendra, dirinya telah melaksanakan proses pemilu tahun 2019 dengan lancar.

"Alhamdulillah, lancar dan kondusif tanpa ada gugatan di MK atau lembaga terkait. Itu sebuah kebanggaan bagi kami, komisioner dan teman-teman KPU," ujar Syailendra, yang menjabat Ketua KPU Kota Tangerang priode 2018-2023.

Selbelum menjabat Ketua KPU Kota Tangerang, Syailendra lebih dahulu menjadi Anggota Divisi Perencanaan dan Data KPU Kota Tangerang priode 2003-2018. Jauh sebelumnya, dalam penyelenggaraan pemilu, Syailendra pernah menjabat sebagai Pemantau Pemilu 2004, Panitia Pemantauan Suara Pilkada Gubernur 2006, Panitia Pemilihan Kecamatan, Pilkada Kota Tangerang 2008 dan 2013,

Pemilu 2009, dan Pilkada Gubernur 2011.

"Setelah itu, diamanahkan oleh rekan-rekan untuk mengemban amanah Ketua KPU Kota Tangerang," terang Syailendra, yang merupakan lulusan Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintah Universitas Muhammadiyah.

Dalam kepemimpinannya, sambung Syailendra, dirinya mengedepankan sifat kolektif kolegial dalam setiap mengambil kebijakan. Terlebih lagi, dirinya tidak mau terlalu akrobatik memaknai jabatannya karena hanyalah simbol semata. "Sebelum keluar menjadi produk Keputusan KPU yang di tandatangani oleh ketua, proses pengambilan keputusannya secara bersama, lima komisioner, kemudian dituangkan dalam BA Pleno" jelasnya.

"Ibaratkan supir mobil, yang membawa penumpang di belakang. Ya, sopir tersebut tidak boleh ugal-ugalan dan membawa rasa nyaman bagi perong yang dibawanya," imbuhnya. ● pp



IDN/ANTARA

### PERSIAPAN MENYAMBUT IMLEK DI BANTEN

Petugas Vihara melipat kertas alat sembahyang (kim cua) di Vihara Avalokitesvara, Kasemen, Serang, Banten, Senin (16/1). Kegiatan tersebut dilakukan menyambut Tahun Baru Imlek 2574/2023 pada 22 Januari mendatang.

### ROKOK KRETEK FILTER DAN BERAS PENYUMBANG TERBESAR

## Penduduk Miskin Banten Bertambah

**SERANG (IM)**- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten merilis penduduk miskin di Banten bertambah. Rokok kretek filter menjadi penyumbang terbesar garis kemiskinan di perkotaan. Sedangkan di daerah pedesaan, beras menjadi penyumbang terbesar.

Statistisi Ahli Madya Indra Warman mengatakan, persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 6,24 persen.

"Meningkat dibandingkan kondisi Maret 2022 yang sebesar 6,16 persen," ujar Indra saat membacakan berita resmi statistik, Senin (16/1).

Indra menerangkan, ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Banten. Yakni kenaikan harga bahan bakar minyak pada September 2022 dan inflasi umum periode Maret 2022-September 2022 sebesar 3,08 persen lebih tinggi dibandingkan inflasi umum periode September 2021-Maret 2022

sebesar 2,70 persen.

Selain itu, ada juga pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2022 tumbuh sebesar 6,15 persen (y-on-y), meningkat dibandingkan triwulan I 2022 yang tumbuh sebesar 2,92 persen. "Ada juga NTP (nilai tukar petani-red) September 2022 sebesar 99,97 persen meningkat dibanding Maret 2022 sebesar 99,03 persen," tuturnya.

Pada Agustus 2022, lanjut Indra, persentase tingkat pengangguran terbuka (IPT) sebesar 8,09 persen. "Daerah perkotaan sebesar 8,13 persen. Lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan sebesar 7,95 persen," ujarnya.

Upah nominal buruh tani pada September 2022 Rp67.910 per hari naik sebesar 1,43 persen dibandingkan pada Maret 2022 yang sebesar Rp66.952 per hari yang juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Banten. ● pra



IDN/ANTARA

### PRODUKSI MAKANAN OLAHAN SMK

Siswa membawa kue hasil produksinya di SMK Negeri 1 Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Senin (16/1). Siswa jurusan kuliner atau tataboga tersebut memproduksi makanan berupa roti, risoles, brownies galendo, bagelen, dan minuman yang dipasarkan di lingkungan sekolah untuk melatih kewirausahaan dan kemandirian siswa, dan beromset Rp500 ribu hingga Rp1 juta per hari.

## Awal Tahun 2023, Kerugian Bencana Alam di Lebak Capai Rp6,1 Miliar

**LEBAK (IM)**- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lebak menyebut kerugian akibat bencana alam banjir dan longsor yang terjadi pada awal tahun 2023 mencapai Rp6,1 Miliar.

Kerugian itu meliputi ribuan rumah yang terendam banjir, kerusakan jalan dan sarana infrastruktur maupun kerugian dampak ekonomi warga yang terganggu akibat bencana itu. "Berdasarkan estimasi kami kerugian dampak bencana itu mencapai Rp6,1 M. Selain sarana prasarana juga rumah yang rusak, kita juga hitung warga yang tidak bisa bekerja atau beraktivitas selama masa bencana itu," kata Febby Rizki Pratama, Kepala Pelaksana Harian BPBD Lebak, Senin (16/1).

Febby mengatakan, bencana banjir, longsor dan pergerakan tanah yang terjadi pada 3 Januari 2023 lalu itu telah berdampak pada 11 Kecamatan. Ia merinci banjir terjadi dan telah merendam 1.095 rumah warga 6 Kecamatan di Lebak. Serta 6 Kecamatan itu yakni Kecamatan Banjarsari, Kalanganyar, Cimarga, Cibadak, Rangkasbitung dan Gunung Kencana. "Kecamatan yang paling

terdampak bencana banjir itu adalah Kecamatan Banjarsari. Sebab dari total 1.095 rumah, ada 607 rumah di Banjarsari yang terdampak," kata Febby.

Febby mengatakan, hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Lebak sejak Senin 2 Januari 2023 malam juga telah menimbulkan bencana alam berupa longsor, pergerakan tanah, dan angin kencang di 5 Kecamatan yakni Kecamatan Muncang, Leuwidamar, Cimarga, Bojongmanik, dan Cikurur.

Adapun jumlah kerusakan totalnya mencapai 48 rumah terdiri dari 44 rumah rusak ringan dan 4 rumah rusak sedang. "Kerusakan paling parah ada di Kecamatan Leuwidamar sebanyak 15 rumah rusak. Dan di Kecamatan Muncang sebanyak 13 rumah rusak akibat longsor dan pergerakan tanah," ujarnya.

Selain rumah, longsor juga terjadi di beberapa ruas jalan di Kecamatan Leuwidamar dan Gunung Kencana. Seperti di jalan Kampung Ciranca, dan Kampung Lengsir, Desa Leuwidamar. Longsor menyebabkan kedua akses jalan itu tidak bisa dilalui kendaraan roda empat. ● pra